



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019-2023

Ni Made Ayu Sri Dewi Natalia^{1*}, Iwan Harsono²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 15, 2025

Revised March 24, 2025

Accepted March 24, 2025

Available online May 27, 2025

Kata Kunci :

Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Pemerintah Daerah

Keywords:

Financial Performance, Financial Ratios, Local Government



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2023 by Ni Made Ayu Sri Dewi Natalia, Iwan Harsono. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram, berdasarkan: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, berada dalam pola hubungan konsultatif karena rasio tersebut berada dalam rentang 25% - 50%. (2) Rasio keserasian dianggap kurang baik karena belanja operasi jauh melebihi belanja modal. (3) Rasio efektivitas dinilai efektif karena mencapai rata-rata sebesar 99,8%. (4) Rasio Efisiensi dapat dikatakan kurang efisien.

ABSTRACT

This study aims to determine the Financial Performance of the Mataram City Government based on the Regional Financial Independence Ratio, Compatibility Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio. This research is descriptive research with a quantitative approach. Data is collected through the documentation method. The results of this study indicate that the financial performance of the Mataram City Government, based on: (1) Regional Financial Independence Ratio, is in a consultative relationship pattern because the ratio is in the range of 25% - 50%. (2) The compatibility ratio is considered unfavorable because operating expenditure far exceeds capital expenditure. (3) The effectiveness ratio is considered effective because it reaches an average of 99.8%. (4) The efficiency ratio can be said to be less efficient.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang mengatur standar serta mekanisme dalam pengelolaan dan laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang menyajikan informasi penting terkait posisi keuangan dan transaksi yang terjadi selama satu tahun anggaran (Wulandari et al., 2023).

Otonomi daerah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan, di mana setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah daerah harus mengelola keuangan dengan baik. Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yaitu Daerah Kota Mataram yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta memenuhi

*Corresponding author

E-mail addresses: nimadeayusridewinatalia@gmail.com (Ni Made Ayu Sri Dewi Natalia)

kebutuhan publik ([Angin et al., 2023](#)).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan dan belanja selama periode 2019-2023. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Mataram menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, fluktuasi dalam pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatnya kebutuhan belanja publik yang harus diatur secara efisien agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa membebani keuangan daerah.

Untuk mengukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pendekatan yang objektif dan dapat digunakan sebagai alat analisis yang akurat. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis ini membantu dalam menilai seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, terutama dalam hal kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan proporsi belanja daerah terhadap pendapatan yang dimiliki. Dengan menggunakan rasio keuangan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan anggaran serta merumuskan strategi yang lebih tepat guna meningkatkan kinerja keuangan daerah di masa mendatang.

Terdapat beberapa indikator utama dalam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat kemandirian daerah tersebut. Selanjutnya, rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio ini mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Selain itu, rasio efisiensi digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan anggaran dalam menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal, sehingga dapat mencegah pemborosan dalam penggunaan anggaran yang tersedia. Keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rasio keserasian juga menjadi indikator penting dalam menganalisis kinerja keuangan daerah. Rasio keserasian menunjukkan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal dalam anggaran daerah. Rasio ini mengukur apakah alokasi anggaran yang digunakan lebih banyak untuk kegiatan rutin atau untuk pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan dan belanja selama periode 2019-2023. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Mataram menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, fluktuasi dalam pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatnya kebutuhan belanja publik yang harus diatur secara efisien agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa membebani keuangan daerah.

Untuk mengukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pendekatan yang objektif dan dapat digunakan sebagai alat analisis yang akurat. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis ini membantu dalam menilai seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, terutama dalam hal kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan proporsi belanja daerah terhadap pendapatan yang dimiliki. Dengan menggunakan rasio keuangan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi

kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan anggaran serta merumuskan strategi yang lebih tepat guna meningkatkan kinerja keuangan daerah di masa mendatang.

Terdapat beberapa indikator utama dalam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat kemandirian daerah tersebut. Selanjutnya, rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, rasio efisiensi mengukur seberapa baik pengelolaan belanja pemerintah daerah dalam menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran yang tersedia ([Sartika & Pratama, 2019](#)).

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram selama periode 2019-2023, terdapat berbagai perubahan dalam pola pendapatan dan belanja yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram menggunakan rasio keuangan. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi anggaran, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Pada penelitian yang dilakukan ([Wulandari et al., 2023](#)) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram ditarik kesimpulan bahwa pada pemerintah Kota Mataram sudah mulai mulai sedikit mandiri, pemerintah Kota Mataram dalam menyelenggarakan desentralisasi masih sangat rendah. Jika dilihat dari rasio efektivitas pemerintah Kota Mataram masih mampu merealisasikan PAD melebihi yang di anggarakan. Keefisienan pemerintah Kota Mataram masih berfluktuasi, namun terlihat dari rasio solvabilitas pemerintah pusat dikatakan mampu dalam memenuhi kewajiban dalam menggunakan aset yang dimiliki.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan tahun dan alat analisis yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan 4 alat analisis yaitu untuk melihat tingkat Kemandirian, Keserasian, Efektivitas, Efisiensi. Pada penelitian ini menggunakan data LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tahun 2019-2023.

Penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai tren dan perubahan dalam kinerja keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang. Hasil analisis yang dilakukan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih baik serta memperbaiki strategi pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, Kota Mataram dapat terus berkembang sebagai kota yang memiliki keuangan daerah yang sehat dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakatnya

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif Kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kota Mataram melalui pengukuran rasio keuangan dalam periode tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Mataram selama tahun 2019 hingga 2023, Data tersebut di peroleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dokumentasi yang berbentuk arspi dan dokumen. Data sekunder ini dianalisis menggunakan berbagai rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan dikembangkan berdasarkan data keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio efektivitas, dan Rasio Efisiensi ([Halim & Iqbal, 2012](#)).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan membiayai kegiatan pemerintahannya ([Alfansa & Wibowo, 2023](#)).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatn}} \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah memiliki pola hubungan antara rasio kemandirian keuangan daerah. Adapun pola hubungan keuangan dengan rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Pola Hubungan dengan Rasio Kemandirian

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	>25% - 50%	Konsultatif
Sedang	>50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	>75% - 100%	delegatif

1. Pola hubungan instruktif terjadi ketika peran Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri.
2. Pola hubungan konsultatif terjadi ketika keterlibatan Pemerintah Pusat mulai berkurang, karena daerah sudah memiliki sedikit kemampuan dalam menjalankan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif muncul ketika peran Pemerintah Pusat semakin berkurang, karena daerah yang bersangkutan hampir mencapai tingkat kemandirian dalam mengelola urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif terjadi ketika Pemerintah Pusat tidak lagi campur tangan, karena daerah telah sepenuhnya mandiri dalam menjalankan otonomi daerah ([Halim, 2004](#)).

2. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan alokasi anggarannya antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Rutin, maka porsi Belanja Pembangunan yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung lebih kecil (Fathah, 2017).

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan gambaran terkait alokasi belanja daerah untuk belanja operasional dan jumlahnya dikisaran 60 – 90% dari total belanja daerah. Belanja Operasi bersifat jangka pendek karena manfaatnya habis dalam satu tahun anggaran dan sering kali bersifat rutin serta berulang setiap tahunnya ([Riswati & Bukhori, 2023](#)). Adapun rumus untuk menghitung rasio belanja operasional yaitu ([Halim, 2012](#)):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja operasional}}{\text{total belanja daerah}} \times 100 \%$$

Terdapat kriteria yang digunakan dalam Rasio Belanja Operasi yaitu dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Kriteria Rasio Belanja Operasi

Belanja Operasi	Kategori Belanja Operasi
<40%	Baik
40% - 80%	Cukup Baik
80% - 100%	Kurang Baik

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan gambaran terkait alokasi belanja daerah untuk pembiayaan investasi dalam bentuk memperbanyak aset atau barang milik daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja modal bersifat jangka pendek yang memiliki kisaran 5 – 20% dari total belanja daerah (Fathah, 2017). Adapun rumus untuk menghitung rasio Belanja Modal yaitu (Halim, 2012):

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100 \%$$

Terdapat kriteria yang digunakan dalam Rasio Belanja Modal yaitu dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. Kriteria Rasio Belanja Modal

Belanja Modal	Kategori Belanja Modal
0% - 10%	Kurang baik
10% - 40%	Cukup Baik
>40%	Baik

3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran pendapatan (Iin Ivanda Listari et al., 2022). Adapun rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas yaitu (Mahmudi, 2015):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Terdapat kriteria yang digunakan dalam Rasio Efektivitas yaitu dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Kriteria Rasio Efektivitas

Efektivitas	Kriteria Efektivitas
<60%	Tidak Efektif
60,01% - 80,00%	Kurang Efektif
80,01% - 90,00%	Cukup Efektif
90,01% - 100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara pengeluaran dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun rumus untuk menghitung Rasio Efisiensi yaitu (Mahmudi, 2015):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Terdapat kriteria yang digunakan dalam Rasio Efisiensi yaitu dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5. Kriteria Efisiensi

Efisiensi	Kriteria Efisiensi
< 60%	Sangat Efisien
60% - 80%	Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
> 100%	Tidak Efisien

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram sebagai proses evaluasi terhadap tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang keuangan selama periode 2019-2023. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Mataram yang diperoleh melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Dari data tersebut, dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan Kota Mataram. Adapun hasil analisis rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan membiayai kegiatan pemerintahannya. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Mataram periode 2019-2023 ditunjukkan pada tabel 6

Tabel 6. Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Mataram 2019-2023

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan	Persentase	Keterangan
2019	372.928.500.000,00	373.951.422.339,15	26%	Konsultatif
2020	320.309.008.468,15	363.165.361.010,56	26%	Konsultatif
2021	370.608.032.419,00	392.556.124.241,49	28%	Konsultatif
2022	422.308.562.050,00	446.332.721.389,05	30%	Konsultatif
2023	447.862.217.089,00	493.612.256.925,72	30%	Konsultatif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram 2019-2023

Berdasarkan tabel 6 diketahui selama kurun waktu lima tahun rasio kemandirian pemerintah Kota Mataram cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 PAD Kota Mataram sebesar Rp. 372.928.500.000,00 atau sebesar 26%, di tahun berikutnya persentase masih sama yaitu sebesar 26% tetapi PAD pada tahun ini sebesar Rp. 320.309.008.468,15. Pada tahun 2021 persentase mengalami peningkatan sebesar 2% menjadi 28%. Dua tahun berikutnya yaitu 2022 dan 2023 mengalami peningkatan persentase yang sama sebesar 2%

sehingga persentase menjadi 30% tetapi memiliki perbedaan PAD. Pada tahun 2022 PAD sebesar Rp. 422.308.562.050,00 dan ditahun 2023 sebesar Rp. 447.862.217.089,00.

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tabel diatas jika dikaitkan dengan pola hubungan tingkat kemandirian Daerah Kota Mataram dapat dikatakan rendah, sehingga masuk kedalam kategori pola hubungan konsultatif. Dalam pola hubungan konsultatif peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang dikarenakan Daerah Kota Mataram tingkat kemandiriannya sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

2. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menunjukkan bagaimana Pemerintah Daerah Kota Mataram mengutamakan alokasi anggarannya secara optimal antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan

a. Rasio Belanja Operasi

Tabel 7. Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Mataram 2019-2023

Tahun Anggaran	Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Persentase	Keterangan
2019	1.115.360.714.808,67	1.449.112.047.541,41	77%	Cukup Baik
2020	1.113.409.266.516,18	1.456.351.203.197,18	76%	Cukup Baik
2021	1.184.146.898.350,37	1.382.384.733.946,57	86%	Kurang Baik
2022	1.287.767.626.136,05	1.464.164.668.856,05	88%	Kurang Baik
2023	1.369.444.965.929,07	1.653.900.067.407,07	83%	Kurang Baik

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram 2019-2023

Berdasarkan tabel 7 Rasio Belanja Operasi Kota Mataram dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi yaitu terjadi kenaikan dan penurunan antara rasio belanja operasi pada tahun 2019 hingga tahun 2023.pada tahun 2019 sebesar 77%, Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 76%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 86% dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 88%. Di tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 5% sehingga persentasenya menjadi 83%.

b. Rasio Belanja Modal

Tabel 8. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Mataram 2019-2023

Tahun Anggaran	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Persentase	Keterangan
2019	331.560.943.664,74	1.449.112.047.541,41	23%	Cukup Baik
2020	209.066.411.335,00	1.456.351.203.197,18	14%	Cukup Baik
2021	185.546.615.534,20	1.382.384.733.946,57	13%	Cukup Baik
2022	174.005.861.795,00	1.464.164.668.856,05	12%	Cukup Baik
2023	281.979.453.862,00	1.653.900.067.407,07	17%	Cukup Baik

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram 2019-2023

Berdasarkan tabel 8 Rasio Belanja Modal kota Mataram mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan dari 23% hingga 12%, kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 5% sehingga persentase menjadi 17%.

Berdasarkan hasil Rasio Keserasian, dapat disimpulkan bahwa belanja operasi mendominasi pengeluaran Kota Mataram. Rasio belanja operasi terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Besarnya belanja operasi ini terutama disebabkan oleh

tingginya pengeluaran untuk belanja pegawai, yang mencakup gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan PNS.

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Mataram mampu merealisasikan pendapatannya. Rasio Efektivitas Daerah Kota Mataram periode 2019-2023 ditunjukkan pada tabel 9

Tabel 9. Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Mataram 2019-2023

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Persentase	Keterangan
2019	1.462.795.712.980,15	1.476.066.007.660,00	99%	Efektif
2020	1.396.009.615.374,56	1.389.869.482.273,15	100%	Efektif
2021	1.419.621.553.492,49	1.436.428.742.820,00	99%	Efektif
2022	1.500.283.093.258,05	1.489.384.179.535,00	101%	Sangat Efektif
2023	1.669.620.357.259,72	1.663.839.319.091,00	100%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram 2019-2023

Berdasarkan perhitungan tabel 9 Rasio Efektivitas Kota Mataram pada tahun 2019 sebesar 99%, ditahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 100%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 99% kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 2% sehingga persentase menjadi 101% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 100%.

Rata-rata Rasio Efektivitas Kota Mataram yang diperoleh sebesar 99,8% masuk dalam kategori Efektif. Dapat dikatakan pemerintah daerah Kota Mataram sudah dikatakan berhasil. Namun, penurunan realisasi pendapatan perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, terutama melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Kota Mataram. Rasio Efisiensi Daerah Kota Mataram periode 2019-2023 ditunjukkan pada tabel 10

Tabel 10. Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Mataram 2019-2023

Tahun Anggaran	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Persentase	Keterangan
2019	1.558.864.869.954,05	1.476.066.007.660,00	99%	Kurang Efisien
2020	1.492.470.511.599,54	1.389.869.482.273,15	104%	Tidak Efisien
2021	1.470.253.561.475,27	1.436.428.742.820,00	97%	Kurang Efisien
2022	1.554.038.568.879,00	1.489.384.179.535,00	98%	Kurang Efisien
2023	1.765.190.255.854,00	1.663.839.319.091,00	99%	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram 2019-2023

Berdasarkan perhitungan tabel 10 Rasio Efisiensi Kota Mataram dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi yaitu terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 sebesar 99% kemudian tahun berikutnya yaitu 2020 mengalami peningkatan menjadi 104%. Di tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 7% menjadi 97%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 98%, tahun berikutnya yaitu 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 99%. Diantara kurun waktu lima tahun rasio efisiensi tertinggi yaitu pada tahun 2021.

Pada perhitungan Rasio Efisiensi daerah Kota Mataram dapat dikatakan kurang efisien. Pemerintah Kota Mataram masih mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memperoleh pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerjanya dalam mengendalikan belanja daerah masih kurang optimal. Ke depannya, diharapkan pemerintah dapat menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga efisiensi belanja daerah dapat meningkat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tingkat Rasio Kemandirian Daerah Kota Mataram dalam 5 tahun terakhir terhitung sejak 2019-2023 berada pada pola konsultatif, dimana tingkat kemandirian pemerintah Kota Mataram dapat dikatakan rendah tetapi sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang. (2) Rasio Keserasian dapat disimpulkan bahwa belanja operasi mendominasi pengeluaran Kota Mataram. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja operasi. (3) Rata rata Rasio Efektivitas Daerah Kota Mataram selama 5 tahun terakhir sebesar 99,8% masuk dalam kriteria efektif. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kota Mataram dapat dikatakan berhasil dalam merealisasikan PAD. (4) Rasio Efisiensi daerah Kota Mataram dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerjanya pemerintah daerah Kota Mataram dalam mengendalikan belanja daerah masih kurang optimal.

Pemerintah Kota Mataram perlu berupaya lebih dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, dalam pengelolaan belanja daerah, perlu adanya optimalisasi, mengingat belanja operasi masih mendominasi pengeluaran. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk meningkatkan alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi daerah, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Mataram. Walaupun efektivitas PAD telah tergolong baik, pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas dalam pencapaian target pendapatan daerah. Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam belanja daerah, diperlukan evaluasi terhadap alokasi anggaran agar pengeluaran yang dilakukan benar-benar berdampak positif pada pembangunan daerah.

5. REFERENSI

- Alfansa, R., & Wibowo, P. (2023). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 150–168. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v4i3.166>
- Angin, P., Natalian, E., & Bharata, R. (2023). Analisis rasio keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1 (3)(3), 173–183.
- Fathah, R. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan keuangan daerah. *Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- In Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian*

- Mahasiswa*, 4(3), 129–140. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396>
- Mahmudi, R. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Riswati, & Bukhori, Y. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal Dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 41–55.
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 179–188. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6494>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>